



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-08/PJ/2012
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS
 KERJA PEMERIKSAAN UNTUK
 MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

..... (2)	Nama WP : (3)
	NPWP : (4)
	Masa/Tahun Pajak : (5)

(6)

Penjelasan		
No	Uraian	Dasar Hukum
1	(7)	(8)
2		
dst		

Dibuat Oleh:			Ditelaah oleh:		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

(15)

Bagian Atas

Bagian Tengah (bag. pertama)

Bagian Tengah (bag. kedua)

Bagian Bawah

**PETUNJUK PENGISIAN
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).
Angka 2 : diisi dengan judul KKP.
Angka 3 : cukup jelas.
Angka 4 : cukup jelas.
Angka 5 : diisi dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa.
Angka 6 : diisi uraian isi KKP (dalam hal uraian isi mengambil bentuk tabel komparasi menurut WP dan menurut Pemeriksa maka bentuk tabel tersebut memperhatikan bentuk label sebagaimana dicontohkan pada lampiran VI).
Angka 7 : diisi dengan :
 - uraian penjelasan dilakukannya koreksi;
 - uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau
 - uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa.Angka 8 : diisi dengan uraian dasar hukum terkait dengan uraian pada angka 7.
Angka 9 : diisi dengan nama Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa.
Angka 10 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa.
Angka 11 : diisi dengan tanggal dibuatnya KKP.
Angka 12 : diisi dengan nama Supervisor Tim pemeriksa.
Angka 13 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.
Angka 14 : diisi dengan tanggal ditelaahnya KKP.
Angka 15 : diisi dengan kode indeks KKP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-08/PJ/2012
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS
 KERJA PEMERIKSAAN UNTUK
 MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DAFTAR KODE INDEKS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

JUDUL KKP	KODE INDEKS
I. PERSIAPAN PEMERIKSAAN 1. Rencana Pemeriksaan 2. Rencana Program Pemeriksaan 3. Realisasi Program Pemeriksaan 4. dst.	A.1 A.2 A.3 dst.
II. INDUK	INDUK
III. PPh BADAN/OP WP BADAN 1. Peredaran Usaha 2. Harga Pokok Penjualan 3. Biaya Usaha Lainnya 4. Penghasilan dari Luar Usaha 5. Biaya dari Luar Usaha 6. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri 7. Penyesuaian Fiskal Positif 8. Penyesuaian Fiskal Negatif 9. Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto 10. Kompensasi Kerugian Fiskal 11. PPh Terutang 12. Kredit Pajak 13. dll.	B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12 dst
WP OP yang menyelenggarakan pembukuan 1. Peredaran Usaha 2. Harga Pokok Penjualan 3. Biaya Usaha 4. Penyesuaian Fiskal Positif 5. Penyesuaian Fiskal Negatif 6. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan 7. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya 8. Penghasilan Neto Luar Negeri 9. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib 10. Kompensasi Kerugian Fiskal 11. Penghasilan Tidak Kena Pajak 12. PPh Terutang 13. Kredit Pajak 14. dll.	B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12 B.13 dst
WP OP yang menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto : 1. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas 2. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan 3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya 4. Penghasilan Neto Luar Negeri 5. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib 6. Kompensasi Kerugian Fiskal	B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6
IV. PPh PASAL 21 1. Tidak Final 2. Final	C D
V. PPh PASAL 22 1. Tidak Final 2. Final	E F
VI. PPh PASAL 23 1. Tidak Final 2. Final	G H
VII. PPh PASAL 26 1. Tidak Final 2. Final	I J
VIII. PPh Final 1. PPh Pasal 4 (2)	K

JUDUL KKP	KODE INDEKS
2. PPh Pasal 15	L
3. PPh Pasal 19	M
IX. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak	N
2. Impor BKP	O
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	P
4. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Q
5. Kegiatan Membangun Sendiri	R
6. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	S
7. Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)	T
8. Penagihan Kembali PPN yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut	U
X. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
1. Penyerahan BKP	V
2. Impor BKP	W
3. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	X
4. Penagihan Kembali PPnBM yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut	Y
XI. JENIS PAJAK LAINNYA	
1. PBB	Z
2. Bea Meterai	AA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN

NAMA DOKUMEN PEMERIKSAAN	
1.	Nota Dinas Penunjukan Supervisor
2.	Surat Perintah Pemeriksaan
3.	Surat Tugas
4.	Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan
5.	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
6.	Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak
7.	Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
8.	Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
9.	Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
10.	Surat Permintaan Wajib Pajak (foto kopi dan data yang dikelola secara elektronik sesuai aslinya)
11.	Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
12.	Laporan Tenaga Ahli
13.	Surat Peringatan I dan II
14.	Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
15.	Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
16.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
17.	Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
18.	Persetujuan atau Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
19.	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
20.	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
21.	Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
22.	Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
23.	Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
24.	Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat.
25.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak
26.	Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan
27.	Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak
28.	Surat Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak Ketiga
29.	Surat Peringatan I dan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan atau Bukti
30.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti
31.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan
32.	Tanggapan tertulis Wajib Pajak atas SPHP
33.	Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan
34.	Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
35.	Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
36.	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan
37.	Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan
38.	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
39.	Risalah Pembahasan
40.	Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
41.	Berita Acara Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
42.	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
43.	Surat permohonan pembahasan dengan Tim <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
44.	Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
45.	Risalah Pembahasan Tim <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
46.	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
47.	Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
48.	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir
49.	Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan
50.	Berita Acara Serah Terima Buku, Catatan, dan Dokumen dari Tim Pemeriksa Pajak kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
51.	Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diserahtherimakan
52.	Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
53.	Laporan Penelitian KLU
54.	Alat Keterangan yang Diproduksi
55.	dll.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-08/PJ/2012
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS
KERJA PEMERIKSAAN UNTUK
MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.	Kode Indeks KKP	Penelaahan Supervisor			Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Anggota Tim		
		Uraian	Paraf	Tanggal	Uraian	Paraf	Tanggal
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**PETUNJUK PENGISIAN
REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

- Angka 1 : cukup jelas.
- Angka 2 : cukup jelas.
- Angka 3 : diisi dengan kode indeks KKP yang ditelaah oleh Supervisor.
- Angka 4 : diisi dengan uraian penelaahan dari Supervisor.
- Angka 5 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.
- Angka 6 : diisi dengan tanggal penelaahan oleh Supervisor Tim Pemeriksa.
- Angka 7 : diisi dengan uraian tindak lanjut dari Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
- Angka 8 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
- Angka 9 : diisi dengan tanggal dilakukannya tindak lanjut oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-08/PJ/2012
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS
 KERJA PEMERIKSAAN UNTUK
 MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN PERPAJAKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.	Judul KKP / Nama Dokumen Pemeriksaan	Kode Indeks
1. 2. dst.	KKP : (2)	(3)
1. 2. dst.	Dokumen Pemeriksaan : (4)	(5)

Supervisor
 (6)

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

- Angka 1 : Cukup Jelas.
- Angka 2 : Diisi dengan judul KKP.
- Angka 3 : Cukup Jelas.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dokumen pemeriksaan.
- Angka 5 : Cukup Jelas.
- Angka 6 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-08/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
--------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi
		SPT WP	Pemeriksa	
PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar	B	160,477,949 22,466,780 22,466,760 - - - -	260,178,339 36,424,920 22,466,780 13,958,140 6,699,907 20,658,048	99,700,390 13,958,140 - 13,958,140 6,699,907 20,658,048
PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar	C	47,009,149 537,500 537,500 - - - -	47,009,149 537,500 537,500 - - - -	- - - - - - -
PPh PASAL 22 Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar	E	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP	G	541,000 10,820 10,820 - - - -	6,041,000 120,820 10,820 110,000 52,800 162,800 100,000	5,500,000 110,000 - 110,000 52,800 162,800 100,000
PPh PASAL 26 FINAL Objek PPh Pasal 26 Final PPh Pasal 26 Final Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 26 Final Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 26 Final Yang Masih Harus Dibayar	J	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Kredit Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Yg Msh Hrs Dibayar	K	750,000 75,000 75,000 - - - -	750,000 75,000 75,000 - - - -	- - - - - - -
PPh PASAL 15 Objek PPh Pasal 15 PPh Pasal 15 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 15 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 15 Yang Masih Harus Dibayar	L	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

PPN Penyerahan BKP/JKP	N			
DPP-PPN Yang Harus dipungut sendiri		319,349,212	417,573,602	98,224,390
Pajak Keluaran Yang Harus dipungut sendiri		31,934,921	41,757,360	9,822,439
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan		31,934,921	31,934,921	-
PPN Kurang (Lebih) Bayar		-	9,822,439	9,822,439
Dikompensasikan		-	-	-
PPN Kurang (Lebih) Bayar		-	9,822,439	9,822,439
Sanksi Administrasi			5,263,139	5,263,139
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar			15,085,578	15,085,578
STP		1,964,488	1,964,488	

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK (Perubahan Pertama)	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
--------------------------------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi
		SPT WP	Pemeriksa	
PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar	B P1	160,477,949 22,466,780 22,466,780 - - -	259,638,339 36,349,320 22,466,780 13,882,540 6,663,619 20,546,160	99,160,390 13,882,540 - 13,882,540 6,663,619 20,546,160
PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar	C	47,009,149 537,500 537,500 - - -	47,009,149 537,500 537,500 - - -	- - - - - -
PPh PASAL 22 Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar	E	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP	G	541,000 10,820 10,820 - - - -	6,041,000 120,820 10,820 110,000 52,800 162,800 100,000	5,500,000 110,000 - 110,000 52,800 162,800 100,000

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPh Badan (Perubahan Pertama)	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
--	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi
		SPT WP	Pemeriksa	
Peredaran Usaha	B.1	369,471,760	467,696,150	98,224,390
Harga Pokok Penjualan	B.2	183,423,976	183,423,976	-
Laba Bruto		186,047,784	284,272,174	98,224,390
Biaya Usaha Lainnya	B.3 P1	29,813,250	29,668,250	145,000
Laba Operasi		156,234,534	254,603,924	98,369,390
Penghasilan dari Luar Usaha	B.4	4,558,846	4,558,846	-
Biaya dari Luar Usaha	B.5	154,800	154,800	-
Penghasilan Neto Luar Negeri	B.6	-	-	-
Laba Neto Komersial		160,638,580	259,007,970	98,369,390
Penyesuaian Fiskal Positif	B.7	-	791,000	791,000
Penyesuaian Fiskal Negatif	B.8	160,631	160,631	-
Fasilitas Penanaman Modal Berupa	B.9	-	-	-
Pengurangan Penghasilan Neto		160,477,949	259,638,339	99,160,390
Penghasilan Neto Fiskal	B.10	-	-	-
Kompensasi Kerugian		160,477,949	259,638,339	99,160,390
Penghasilan Kena Pajak	B.11 P1	22,466,780	36,349,320	13,882,540
PPh Badan Terutang	B.12	22,466,780	22,466,780	-
Kredit Pajak		-	13,882,540	13,882,540
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar		-	6,663,619	6,663,619
Sanksi Administrasi :		-	20,546,160	20,546,160
- Pasal 13 (2) UU KUP				
2% x 24 Bulan x Rp 13.882.540				
PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar		-	20,546,160	20,546,160

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B P1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPh Badan	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi
		SPT WP	Pemeriksa	
Peredaran Usaha	B.1	369,471,760	467,696,150	98,224,390
Harga Pokok Penjualan	B.2	183,423,976	183,423,976	-
Laba Bruto		186,047,784	284,272,174	98,224,390
Biaya Usaha Lainnya	B.3	29,813,250	29,128,250	685,000
Laba Operasi		156,234,534	255,143,924	98,909,390
Penghasilan dari Luar Usaha	B.4	4,558,846	4,558,846	-
Biaya dari Luar Usaha	B.5	154,800	154,800	-
Penghasilan Neto Luar Usaha	B.6	-	-	-
Laba Neto Komersial		160,638,580	259,547,970	98,909,390
Penyesuaian Fiskal Positif	B.7	-	791,000	791,000
Penyesuaian Fiskal Negatif	B.8	160,631	160,631	-
Fasilitas Penanaman Modal Berupa	B.9	-	-	-
Pengurangan Penghasilan Neto		160,477,949	260,178,339	99,700,390
Penghasilan Neto Fiskal	B.10	-	-	-
Kompensasi Kerugian		160,477,949	260,178,339	99,700,390
Penghasilan Kena Pajak	B.11	22,466,780	36,424,920	13,958,140
PPh Badan Terutang	B.12	22,466,780	22,466,780	-
Kredit Pajak		-	13,958,140	13,958,140
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar				
Sanksi Administrasi :				
- Pasal 13 (2) UU KUP				
2% x 24 Bulan x Rp 13.958.140			6,699,907	6,699,907
PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar			20,658,048	20,658,048

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Peredaran Usaha	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
------------------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Penjualan Ekspor	B.1.1	50.122.548	50.122.548	-
Penjualan Lokal		319.349.212	417.573.602	98.224.390
Jumlah		369.471.760	467.696.150	98.224.390

Pos penjualan ekspor tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penjualan Lokal	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Rincian Penjualan
- Dokumen Pendukung (*delivery order, invoice*)

Pengujian dilakukan melalui *tracing* dari dokumen pendukung ke laporan penjualan

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		28.265.159	28.265.159	-
Februari	B.1.1.1	35.128.599	45.187.455	10.058.856
Maret		12.499.782	12.499.782	-
April	B.1.1.1	19.468.799	25.487.012	6.018.213
Mei		40.598.465	40.598.465	-
Juni		35.488.720	35.488.720	-
Juli		45.155.874	45.155.874	-
Agustus	B.1.1.1	14.255.958	54.879.255	40.623.297
September		16.254.699	16.254.699	-
Oktober		39.800.457	39.800.457	-
Nopember	B.1.1.1	15.487.250	39.154.899	23.667.649
Desember	B.1.1.1	16.945.450	34.801.825	17.856.375
Jumlah		319.349.212	417.573.602	98.224.390

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Lihat KKP B.1.1.1	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh
2.	Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.1.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Rekapitulasi <i>Delivery Order</i> yang belum dilaporkan WP	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- Dokumen Pendukung (delivery order, invoice)

Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan

No	Nomor DO	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	145-02-2009	12/02/2009	10.058.856
2	25/04/2009	05/04/2009	6.018.213
3	245-08-2009	03/08/2009	24.988.752
4	358-08-2009	24/08/2009	15.634.545
5	15/11/2009	25/11/2009	23.667.649
6	145-12-2009	25/12/2009	17.856.375
Jumlah			98.224.390

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dokumen pengangkutan (<i>delivery order</i>).	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh
2.	Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.1.1.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Harga Pokok Penjualan	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
------------------------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Persediaan Awal Bahan Baku	B.2.1	1.527.958	1.527.958	
Pembelian Bahan Baku		234.774.780	234.774.780	
Persediaan Akhir Bahan Baku	B.2.2	93.186.052	93.186.052	
Pemakaian Bahan Baku		143.116.686	143.116.686	
Tenaga Kerja Langsung		30.259.149	30.259.149	
Biaya Overhead		17.304.205	17.304.205	
Jumlah Biaya Produksi		190.680.040	190.680.040	-
Persediaan Awal		5.972.583	5.972.583	
Barang Tersedia Untuk dijual		196.652.623	196.652.623	-
Persediaan Akhir Barang Jadi		13.228.647	13.228.647	
HPP		183.423.976	183.423.976	-

Pos-pos berikut ini tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan :

1. Persediaan awal bahan baku
2. Tenaga kerja langsung
3. Biaya overhead
4. Persediaan Awal Barang Jadi
5. Persediaan Akhir Barang Jadi

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Biaya Tenaga Kerja Langsung merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21	Pasal 21 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.2

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pembelian Bahan Baku	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas
- *Purchase Order dan Receiving Report*

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi dan ekualisasi dengan DPP PPN Pajak Masukan (KKP B.2.1.1)

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Bahan Baku A		120.456.740	120.456.740	-
Bahan Baku B		79.087.530	79.087.530	-
Bahan Baku C		35.230.510	35.230.510	-
Jumlah		234.774.780	234.774.780	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa Pembelian Bahan Baku telah dilaporkan sesuai bukti yang ada	Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.2.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pembelian Berdasarkan DPP PPN Pajak Masukan	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- SPT Masa PPN
- Voucher pengeluaran
- Buku kas
- Purchase Order dan Receiving Report
- Faktur Pajak Masukan

Pengujian dilakukan dengan teknik ekualisasi pos pembelian bahan baku dengan DPP PPN Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT

Pembelian DPP PPN Pajak Masukan

1. DPP Pajak Masukan Impor	Rp	39.888.830	
2. DPP Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp	194.885.950	
3. DPP Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya dikreditkan tahun berikutnya	Rp	-	
4. DPP Pajak Masukan dari pembelian tahun sebelumnya	Rp	-	
			Rp 234.774.780

Pembelian menurut SPT Wajib Pajak

1. Bahan Baku A	Rp	120.456.740	
2. Bahan Baku B	Rp	79.087.530	
3. Bahan Baku C	Rp	35.230.510	
			Rp 234.774.780
			Rp -

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat selisih antara Pembelian yang dilaporkan Wajib Pajak dengan DPP PPN Pajak Masukan (Perolehan)	Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.2.1.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Persediaan Akhir Bahan Baku	Nama WP : PT Abcdefgh
	NPWP : 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Buku Besar
- Kartu Persediaan
- Kartu Gudang

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Bahan Baku A		57.340.990	57.340.990	-
Bahan Baku B		24.908.765	24.908.765	-
Bahan Baku C		10.936.297	10.936.297	-
Jumlah		93.186.052	93.186.052	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti/sumber dokumen disimpulkan bahwa Persediaan Akhir Bahan Baku telah sesuai bukti yang ada	Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.2.2

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Biaya Usaha Lainnya (Perubahan Pertama)	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
--	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	B.3.1	16.750.000	16.750.000	-
Pemasaran	B.3.2 P1	1.066.500	921.500	145.000
Sewa	B.3.3	1.291.000	1.291.000	-
Perjalanan dinas		150.000	150.000	-
Pemeliharaan gedung dan peralatan		134.000	134.000	-
Telepon dan teleks		50.000	50.000	-
Beban bank		10.000	10.000	-
Asuransi		145.000	145.000	-
Pos cetakan ATK fotocopy & angkutan		500.450	500.450	-
<i>Consultant Fee</i>	B.3.4	5.500.000	5.500.000	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	B.3.5	250.000	250.000	-
Seminar dan latihan		125.000	125.000	-
Penyusutan		3.421.300	3.421.300	-
Listrik dan air		420.000	420.000	-
Jumlah		29.813.250	29.668.250	145.000

Pos-pos berikut ini tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan :

1. Perjalanan dinas
2. Pemeliharaan gedung dan peralatan
3. Telepon dan teleks
4. Beban bank
5. Asuransi
6. Pos cetakan ATK fotocopy & angkutan
7. Seminar dan latihan
8. Penyusutan
9. Listrik dan air

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.3 P1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Biaya Usaha Lainnya	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
----------------------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	B.3.1	16.750.000	16.750.000	-
Pemasaran	B.3.2	1.066.500	381.500	685.000
Sewa	B.3.3	1.291.000	1.291.000	-
Perjalanan dinas		150.000	150.000	-
Pemeliharaan gedung dan peralatan		134.000	134.000	-
Telepon dan teleks		50.000	50.000	-
Beban bank		10.000	10.000	-
Asuransi		145.000	145.000	-
Pos cetakan ATK fotocopy & angkutan		500.450	500.450	-
<i>Consultant Fee</i>	B.3.4	5.500.000	5.500.000	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	B.3.5	250.000	250.000	-
Seminar dan latihan		125.000	125.000	-
Penyusutan		3.421.300	3.421.300	-
Listrik dan air		420.000	420.000	-
Jumlah		29.813.250	29.128.250	685.000

Pos-pos berikut ini tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan :

1. Perjalanan dinas
2. Pemeliharaan gedung dan peralatan
3. Telepon dan teleks
4. Beban bank
5. Asuransi
6. Pos cetakan ATK fotocopy & angkutan
7. Seminar dan latihan
8. Penyusutan
9. Listrik dan air

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : B.3

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		1.200.000	1.200.000	-
Februari		1.200.000	1.200.000	-
Maret		1.200.000	1.200.000	-
April		1.200.000	1.200.000	-
Mei		1.200.000	1.200.000	-
Juni		1.200.000	1.200.000	-
Juli		1.200.000	1.200.000	-
Agustus		1.200.000	1.200.000	-
September		3.550.000	3.550.000	-
Oktober		1.200.000	1.200.000	-
Nopember		1.200.000	1.200.000	-
Desember		1.200.000	1.200.000	-
Jumlah		16.750.000	16.750.000	-

Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Terdiri dari :

1. Gaji	9.600.000
2. Tunjangan Makan	2.400.000
3. Tunjangan Transportasi	2.400.000
4. Tunjangan Hari Raya	<u>2.350.000</u>
	16.750.000

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21	Pasal 21 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pemasaran (Perubahan Pertama)	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
--	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		540.000	540.000	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		250.400	250.400	-
Agustus		-	-	-
September		145.000	-	145.000
Oktober		-	-	-
Nopember		131.100	131.100	-
Desember		-	-	-
Jumlah		1.066.500	921.500	145.000

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Pada KKP B.3.2 Biaya Pemasaran dikoreksi karena berdasarkan bukti yang dipinjam dan yang dipinjamkan Wajib Pajak, tidak terdapat bukti kompeten yang cukup atas pengeluaran pada bulan April dan September	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 13 ayat (1) UU KUP Pasal 6 ayat (1) UU PPh
2.	Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan Wajib Pajak hanya dapat menunjukkan bukti pengeluaran bulan April, sehingga koreksi di bulan April dibatalkan dan koreksi di bulan September tetap dipertahankan. Koreksi awal Rp 685.000,00 Koreksi yang dibatalkan Rp 540.000,00 Koreksi yang dipertahankan Rp 145.000,00	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 13 ayat (1) UU KUP Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pemasaran	Nama WP : PT Abcdefgh
	NPWP : 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		540.000	-	540.000
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		250.400	250.400	-
Agustus		-	-	-
September		145.000	-	145.000
Oktober		-	-	-
Nopember		131.100	131.100	-
Desember		-	-	-
Jumlah		1.066.500	381.500	685.000

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Koreksi dilakukan karena berdasarkan pemeriksaan atas bukti/ sumber dokumen disimpulkan tidak terdapat bukti kompeten yang cukup atas pengeluaran pada bulan April dan September.	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 13 ayat (1) UU KUP Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Sewa	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
-------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		-	-	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		-	-	-
Agustus		750.000	750.000	-
September		-	-	-
Oktober		-	-	-
Nopember		-	-	-
Desember		541.000	541.000	-
Jumlah		1.291.000	1.291.000	-

Sewa Terdiri dari

- | | | | | | |
|------------------|--|----------------|--|--|--|
| 1. Sewa Bangunan | | 750.000 | | | |
| 2. Sewa Mobil | | <u>541.000</u> | | | |
| | | 1.291.000 | | | |

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti/dokumen sumber disimpulkan sewa mobil digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham (digunakan oleh anaknya). Koreksi ini oleh Pemeriksa diperhitungkan sebagai koreksi pada pos Penyesuaian Fiskal Positif (KKP B.7)	Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh
2.	Biaya sewa mobil merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23	Pasal 23 UU PPh
3.	Biaya sewa bangunan merupakan objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2012

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Consultant Fee	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
-----------------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		-	-	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		3.000.000	3.000.000	-
Agustus		-	-	-
September		-	-	-
Oktober		-	-	-
Nopember		-	-	-
Desember		2.500.000	2.500.000	-
Jumlah		5.500.000	5.500.000	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	<i>Consultant fee</i> dibayarkan kepada PT xxx atas jasa konsultasi pemasaran yang dilakukan PT xxx. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat koreksi karena Wajib Pajak telah melaporkan sesuai bukti yang ada	Pasal 6 ayat (1) UU PPh
2.	<i>Consultant fee</i> ini merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23	Pasal 23 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Daftar Piutang dan Umur Piutang

Pengujian dilakukan melalui penelitian bidang usaha wajib pajak dengan bidang usaha yang dapat membuat cadangan sesuai pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh.

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		-	-	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		-	-	-
Agustus		-	-	-
September		-	-	-
Oktober		-	-	-
Nopember		-	-	-
Desember		-	-	-
Jumlah		250.000	250.000	-
		250.000	250.000	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan pemeriksaan atas bukti yang disampaikan dan kegiatan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak termasuk kelompok usaha yang diperbolehkan membebaskan biaya penyisihan piutang ragu-ragu. Koreksi ini oleh Pemeriksa diperhitungkan sebagai koreksi pada pos Penyesuaian Fiskal Positif (KKP B.7)	Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penghasilan dari Luar Usaha	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Buku Besar
- Rekening koran

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran angka-angka ke dokumen-dokumen pendukung transaksi / perhitungan.

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Pendapatan Jasa Giro		160.631	160.631	-
Keuntungan Selisih Kurs		4.398.215	4.398.215	-
Jumlah		4.558.846	4.558.846	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan penyesuaian fiskal negatif terhadap pos pendapatan jasa giro (lihat KKP B.8)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh Penjelasan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 131 Tahun 2001
2.	Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perhitungan keuntungan selisih kurs telah dilakukan secara taat asas.	Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Biaya dari Luar Usaha	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Buku Besar
- Rekening koran

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran angka-angka ke dokumen-dokumen pendukung transaksi/perhitungan

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Biaya Administrasi Bank		154.800	154.800	-
Jumlah		154.800	154.800	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan pemeriksaan atas bukti/sumber dokumen disimpulkan bahwa Biaya Administrasi Bank telah sesuai dengan bukti yang ada dan ketentuan perpajakan.	Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penghasilan Neto Luar Negeri	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
-------------------------------------	--

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Penghasilan Neto Luar Negeri		-	-	-

Pos-pos dalam Penghasilan Neto Luar Negeri tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan.

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penyesuaian Fiskal Positif	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Voucher pengeluaran
- Buku kas
- Daftar Piutang dan Umur Piutang

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota		-	541.000	541.000
b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan		-	250.000	250.000
c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan		-	-	-
d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan		-	-	-
e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan		-	-	-
f. Pajak penghasilan		-	-	-
g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma/cv yang modalnya tidak terbagi atas saham		-	-	-
h. Sanksi administrasi		-	-	-
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal		-	-	-
j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal		-	-	-
k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya		-	-	-
l. Penyesuaian fiskal positif lainnya		-	-	-
Jumlah		-	791.000	791.000

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham (lihat KKP B.3.3)	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh
2.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak dapat membuat cadangan atas piutang ragu-ragu (lihat KKP B.3.5)	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Penyesuaian Fiskal Negatif	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Rekening koran

Pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung transaksi

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
a. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak		160.631	160.631	-
b. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal		-	-	-
c. Selisih amortisasi komersial di bawah penyusutan fiskal		-	-	-
d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya		-	-	-
e. Penyesuaian fiskal negatif lainnya		-	-	-
Jumlah		160.631	160.631	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Hasil pengujian menyimpulkan bahwa Wajib Pajak memang menerima pendapatan jasa giro yang dikenakan pajak bersifat final	Pasal 4 ayat (2) UU PPh Penjelasan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 131 Tahun 2001

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto		-	-	-

Pos Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan.

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Kompensasi Kerugian	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Kompensasi Kerugian		-	-	-

Pos Kompensasi Kerugian tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPh Badan Terutang (Perubahan Pertama)	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan

Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa	
PKP dibulatkan	Rp 259.638.339
	Rp 259.638.000
PPh Terutang menurut Pemeriksa :	
50% x 28% x Rp 259.638.000 =	Rp 36.349.320
PPh Terutang menurut WP	<u>Rp 22.466.780</u>
Koreksi	Rp 13.882.540

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31E UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPh Badan Terutang	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan

Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa Rp 260.178.339
PKP dibulatkan Rp 260.178.000

PPh Terutang menurut Pemeriksa :
 $50\% \times 28\% \times \text{Rp } 260.178.000 =$ Rp 36.424.920
 PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780
 Koreksi Rp 13.958.140

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31 E UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Kredit Pajak	Nama WP : PT Abcdefgh
	NPWP : 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SSP
- Rekening Koran

Pengujian keabsahan kredit pajak dilakukan dengan teknik pencocokan SSP dengan data MPN

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
PPh Ps 22 Impor		997.221	997.221	-
PPh Ps 23 Dipotong		-	-	-
PPh Ps. 25		17.645.349	17.645.349	-
PPh Ps. 29		3.824.210	3.824.210	-
Pokok STP		-	-	-
Jumlah		22.466.780	22.466.780	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa SSP tersebut sesuai dengan data MPN	Pasal 28 UU PPh Pasal 29 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-148/PJ/2007

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPH Pasal 21	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
---------------------	--

	Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1	OBJEK PAJAK				
	a. Pegawai Tetap	C.1	16.750.000	16.750.000	-
	b. Penerima Pensiun Berkala		-	-	-
	c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas	C.1	30.259.149	30.259.149	-
	d. Distributor MLM		-	-	-
	e. Petugas Dinas Luar Asuransi		-	-	-
	f. Penjaja Barang Dagangan		-	-	-
	g. Tenaga Ahli		-	-	-
	h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap		-	-	-
	i. Lain		-	-	-
	j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun		-	-	-
	k. Peserta Kegiatan		-	-	-
	l. Berkesinambungan		-	-	-
	m. Bukan Pegawai yang menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat		-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21		47.009.149	47.009.149	-
2	PAJAK TERUTANG				
	a. Pegawai Tetap		335.000	335.000	-
	b. Penerima Pensiun Berkala		-	-	-
	c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		202.500	202.500	-
	d. Distributor MLM		-	-	-
	e. Petugas Dinas Luar Asuransi		-	-	-
	f. Penjaja Barang Dagangan		-	-	-
	g. Tenaga Ahli		-	-	-
	h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap		-	-	-
	i. Lain		-	-	-
	j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun		-	-	-
	k. Peserta Kegiatan		-	-	-
	l. Berkesinambungan		-	-	-
	m. Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat		-	-	-
	JUMLAH PPH PASAL 21 TERUTANG		537.500	537.500	-
3	KREDIT PAJAK		537.500	537.500	-
4	PPH PASAL 21 KURANG / (LEBIH) DIBAYAR		-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI :				
	a. SKPKB				
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP		-	-	-
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		-	-	-
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP		-	-	-
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP		-	-	-
	b. SKPKBT				
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP		-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI				
6	PPH Pasal 21 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR				
7	S T P				
	a. Denda Pasal 7 KUP		-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		-	-	-
	JUMLAH STP		-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 21	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
---------------------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-pos Laporan Laba Rugi :

1.	Tenaga Kerja Langsung (KKP B.2)	Rp 30.259.149
2.	Gaji dan Kesejahteraan Karyawan (KKP B.3.1)	
	- Gaji	Rp 9.600.000
	- Tunjangan Makan	Rp 2.400.000
	- Tunjangan Transportasi	Rp 2.400.000
	- Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 2.350.000</u>
	Jumlah	<u>Rp 16.750.000</u>

Rp 16.750.000

Rp 47.009.149

Pos-Pos Neraca

Objek dari masa sebelumnya

Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain

Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain

Objek Pajak Menurut Pemeriksa

Objek Pajak Menurut SPT WP

Koreksi Objek Pajak

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 47.009.149

Rp 47.009.149

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 21 telah seluruhnya dipotong dan dilaporkan oleh Wajib Pajak	PPh Pasal 21 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Indeks : C.1

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPH Pasal 21 - Final	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
-----------------------------	--

	Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPT WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1	OBJEK PAJAK a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah		-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 FINAL		-	-	-
2	PAJAK TERUTANG a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah		-	-	-
	JUMLAH PPH PASAL 21 FINAL TERUTANG		-	-	-
3	KREDIT PAJAK		-	-	-
4	PPH PASAL 21 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR		-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP b. SKPKBT b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI				
6	PPH PASAL 21 FINAL YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR				
7	S T P a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	JUMLAH STP				

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 21 Final	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

-	Rp	-
-	<u>Rp</u>	-
Jumlah	Rp	-
Pos-Pos Neraca	Rp	-
Objek dari masa sebelumnya	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya	Rp	-
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain	<u>Rp</u>	-
Objek Pajak Menurut Pemeriksa	Rp	-
Objek Pajak Menurut SPT WP	<u>Rp</u>	-
Koreksi Objek Pajak	Rp	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 21 Final	PPh Pasal 21 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

4	PPH PASAL 22 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI																
	a. SKPKB																
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP																
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP																
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP																
	b. SKPKBT																
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP																
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP																
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PPh PASAL 22 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	STP																
	a. Denda Pasal 7 KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Menurut SPT Wajib Pajak

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	TARIF	REF	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK															
	a. Pembelian Barang oleh bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 22															
2	PAJAK TERUTANG															
	a. Pembelian Barang oleh bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPH PASAL 22 TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPH PASAL 22 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 22	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
---------------------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca.

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

-	Rp	-
-	<u>Rp</u>	-
Jumlah	Rp	-
Pos-Pos Neraca	Rp	-
Objek dari masa sebelumnya	Rp	-
Dipungut/disetor/dilaporkan masa berikutnya	Rp	-
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan/Pemungutan lain	Rp	-
Dipungut/disetor/dilaporkan di KPP lain	<u>Rp</u>	-
Objek Pajak Menurut Pemeriksa	Rp	-
Objek Pajak Menurut SPT WP	<u>Rp</u>	-
Koreksi Objek Pajak	Rp	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPh Pasal 22 - Final	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
-----------------------------	--

Menurut Pemeriksa

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	TARIF	REF	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK a. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 22 FINAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PAJAK TERUTANG a. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPH PASAL 22 FINAL TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPh PASAL 22 FINAL YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP b. SKPKBT b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PPh PASAL 22 FINAL YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	STP a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Menurut SPT Wajib Pajak

No	URAIAN	TARIF	REF	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK															
	a. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 22 FINAL															
2	PAJAK TERUTANG															
	a. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPH PASAL 22 FINAL TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPH PASAL 22 FINAL YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. SKPKBT															
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			-	-	-	-	-	-	28.800	-	-	-	-	24.000	52.800
6	PPH PASAL 23 YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	88.800	-	-	-	-	74.000	162.800
7	S T P															
	a. Denda Pasal 7 KUP			-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP			-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 22 Final	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 22 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca.

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

-	Rp	-
-	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pos-Pos Neraca	Rp	-
Objek dari masa sebelumnya	Rp	-
Dipungut/disetor/dilaporkan masa berikutnya	Rp	-
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan/Pemungutan lain	Rp	-
Dipungut/disetor/dilaporkan di KPP lain	Rp	-
Objek Pajak Menurut Pemeriksa	Rp	-
Objek Pajak Menurut SPT WP	Rp	-
Koreksi Objek PPh Pajak	Rp	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 22 Final	PPh Pasal 22 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

Menurut SPT Wajib Pajak

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	TARIF	REF	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	OBJEK PAJAK															
	a. Deviden			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Royalti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Hadiah dan Penghargaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Sewa	2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000	541.000
	f. Jasa :															
	1) Jasa Teknik			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Jasa Manajemen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) Jasa Konsultan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) Jasa Konstruksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) dst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH OBJEK PPH PASAL 23			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000	541.000
2	PAJAK TERUTANG															
	a. Deviden			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Royalti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Hadiah dan Penghargaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Sewa	2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.820	10.820
	f. Jasa :															
	1) Jasa Teknik			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Jasa Manajemen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) Jasa Konsultan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4) Jasa Konstruksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5) dst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPH PASAL 23 TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.820	10.820
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.820	10.820
4	PPH PASAL 23 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

	k. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l. Penghasilan Tertentu Lainnya				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPh PASAL 26 FINAL TERUTANG				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDIT PAJAK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPh PASAL 26 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI :																
	a. SKPKB																
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. SKPKBT																
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PPh PASAL 26 FINAL YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S T P																
	a. Denda Pasal 7 KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 23	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
---------------------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

- Sewa (KKP B.3.3) Rp 541.000
- Consultant Fee (KKP B.3.4) Rp 5.500.000

Jumlah Rp 6.041.000

Pos-Pos Neraca Rp -

Objek dari masa sebelumnya Rp -

Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp -

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp -

Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp -

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 6.041.000

Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 541.000

Koreksi Objek Pajak Rp 5.500.000

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat objek PPh Pasal 23 berupa consultant fee yang belum dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak	Pasal 12 ayat (3) UU KUP PPh Pasal 23 UU KUP

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

3	KREDIT PAJAK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPh PASAL 26 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 26 Final	Nama WP : PT Abcdefgh
	NPWP : 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 26 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

-	Rp	-
-	<u>Rp</u>	-
Jumlah		
Pos-Pos Neraca	Rp	-
Objek dari masa sebelumnya	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya	Rp	-
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain	<u>Rp</u>	-
Objek Pajak Menurut Pemeriksa	Rp	-
Objek Pajak Menurut SPT WP	<u>Rp</u>	-
Koreksi Objek Pajak	Rp	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 26 Final	PPh Pasal 26 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

	JUMLAH PPh FINAL - PASAL 4 AYAT (2) TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	75.000
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	75.000
4	PPh FINAL - PASAL 4 AYAT (2) YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI :															
	a. SKPKB															
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. SKPKBT															
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PPh FINAL - PASAL 4 AYAT (2) YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S T P															
	a. Denda Pasal 7 KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

- Sewa Bangunan Rp 750.000

Pos-Pos Neraca Rp -

Objek dari masa sebelumnya Rp -

Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp -

Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp -

Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp -

Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 750.000

Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 750.000

Koreksi Objek Pajak Rp -

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal Final Pasal 4 ayat (2)	PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

	d. Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PPh PASAL 15 TERUTANG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KREDIT PAJAK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPh PASAL 15 YANG KURANG / (LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SANKSI ADMINISTRASI																
	a. SKPKB																
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. SKPKBT																
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PPh PASAL 15 YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S T P																
	a. Denda Pasal 7 KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH STP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek PPh Pasal 15	Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
---------------------------	--

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh PPh Pasal 15 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca

Objek Pajak menurut Pemeriksa

Pos-Pos Laporan Laba Rugi :

-	Rp	-
-	<u>Rp</u>	-
Jumlah		
Pos-Pos Neraca	Rp	-
Objek dari masa sebelumnya	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya	Rp	-
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain	Rp	-
Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain	<u>Rp</u>	-
Objek Pajak Menurut Pemeriksa	Rp	-
Objek Pajak Menurut SPT WP	<u>Rp</u>	-
Koreksi Objek Pajak	Rp	-

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 15	PPh Pasal 15 UU PPh

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PPN PENYERAHAN BKP/JKP	Nama WP : PT Abcdefgh
	NPWP : 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009

Menurut Pemeriksa

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	GABUNGAN
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
	a. Terutang PPN														
	a.1 Ekspor		-	-	-	-	-	10.584.985	-	-	-	35.988.740	-	3.548.823	50.122.548
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		28.265.159	45.187.455	12.499.782	25.487.012	40.598.465	35.488.720	45.155.874	54.879.255	16.254.699	39.800.457	39.154.899	34.801.825	417.573.602
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah penyerahan		28.265.159	45.187.455	12.499.782	25.487.012	40.598.465	46.073.705	45.155.874	54.879.255	16.254.699	75.789.197	39.154.899	38.350.648	467.696.150
	b. Tidak Terutang PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa		28.265.159	45.187.455	12.499.782	25.487.012	40.598.465	46.073.705	45.155.874	54.879.255	16.254.699	75.789.197	39.154.899	38.350.648	467.696.150
	Jumlah Penyerahan menurut WP		28.265.159	35.128.599	12.499.782	19.468.799	40.598.465	46.073.705	45.155.874	14.255.958	16.254.699	75.789.197	15.487.250	20.494.273	369.471.760
	Koreksi		-	10.058.856	-	6.018.213	-	-	-	40.623.297	-	-	23.667.649	17.856.375	98.224.390
	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA														
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan,		-	15.002.180	-	2.456.890	8.905.000	-	-	8.945.770	4.578.990	-	-	-	39.888.830
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan.		14.520.000	25.433.390	-	15.400.000	25.114.580	21.547.000	12.597.880	10.548.770	10.480.000	30.184.220	14.280.000	14.780.110	194.885.950
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa		14.520.000	40.435.570	-	17.856.890	34.019.580	21.547.000	12.597.880	19.494.540	15.058.990	30.184.220	14.280.000	14.780.110	234.774.780
	Jumlah Perolehan menurut Wajib Pajak		14.520.000	40.435.570	-	17.856.890	34.019.580	21.547.000	12.597.880	19.494.540	15.058.990	30.184.220	14.280.000	14.780.110	234.774.780
	Koreksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA														
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		2.826.516	4.518.746	1.249.978	2.548.701	4.059.847	3.548.872	4.515.587	5.487.926	1.625.470	3.980.046	3.915.490	3.480.183	41.757.360
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa		2.826.516	4.518.746	1.249.978	2.548.701	4.059.847	3.548.872	4.515.587	5.487.926	1.625.470	3.980.046	3.915.490	3.480.183	41.757.360
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Wajib Pajak		2.826.516	3.512.860	1.249.978	1.946.880	4.059.847	3.548.872	4.515.587	1.425.596	1.625.470	3.980.046	1.548.725	1.694.545	31.934.921
	Koreksi		-	1.005.886	-	601.821	-	-	-	4.062.330	-	-	2.366.765	1.785.638	9.822.439
3	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR														
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		2.826.516	4.518.746	1.249.978	2.548.701	4.059.847	3.548.872	4.515.587	5.487.926	1.625.470	3.980.046	3.915.490	3.480.183	41.757.360
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	c. Pajak yang dapat diperhitungkan													
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat	-	1.500.218	-	245.689	890.500	-	-	894.577	457.899	-	-	-	3.988.883
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	1.452.000	2.543.339	-	1.540.000	2.511.458	2.154.700	1.259.788	1.054.877	1.048.000	3.018.422	1.428.000	1.478.011	19.488.595
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	245.000	-	530.697	-	-	-	-	-	523.858	404.287	-	-	245.000
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembedaan SPT Masa PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	1.129.516	-	719.281	161.191	657.889	1.394.172	3.255.799	-	-	557.336	120.725	216.534	8.212.443
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa	2.826.516	4.043.557	1.249.978	1.946.880	4.059.847	3.548.872	4.515.587	1.949.454	2.029.757	3.980.046	1.548.725	1.694.545	31.934.921
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Wajib Pajak	2.826.516	4.043.557	1.249.978	1.946.880	4.059.847	3.548.872	4.515.587	1.949.454	2.029.757	3.980.046	1.548.725	1.694.545	31.934.921
	Koreksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar	-	475.189	-	601.821	-	-	-	3.538.472	(404.287)	-	2.366.765	1.785.638	9.822.439
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	-	475.189	-	601.821	-	-	-	3.538.472	(404.287)	-	2.366.765	1.785.638	9.822.439
5	Dikompensasikan	-	530.697	-	-	-	-	-	523.858	404.287	-	-	-	-
6	Direstitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	-	1.005.886	-	601.821	-	-	-	4.062.330	-	-	2.366.765	1.785.638	9.822.439
8	Sanksi Administrasi													
	a. SKPKB													
	a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	228.090	-	288.874	-	-	-	1.698.466	-	-	1.136.047	857.106	4.208.584
	a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	530.697	-	-	-	-	-	523.858	-	-	-	-	1.054.555
	a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. SKPKBT													
	b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Sanksi	-	758.788	-	288.874	-	-	-	2.222.325	-	-	1.136.047	857.106	5.263.139
9	PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	-	1.764.673	-	890.696	-	-	-	6.284.654	-	-	3.502.812	2.642.744	15.085.578
10	S T P													
	a. Denda Pasal 7 KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 14 (4) KUP	-	201.177	-	120.364	-	-	-	812.466	-	-	473.353	357.128	1.964.488
	f. Bunga Pasal 14 (5) KUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah STP	-	201.177	-	120.364	-	-	-	812.466	-	-	473.353	357.128	1.964.488

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"**

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Objek PPN	Nama WP	: PT Abcdefgh
	NPWP	: 01.234.567.8.666.000
	Masa/Tahun Pajak	: Januari - Desember 2009

Sumber data :

- SPT Tahunan PPh Badan
- SPT Masa PPN
- Buku Besar

Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi peredaran usaha dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN

Uraian	Ref.	Menurut		Koreksi
		SPT WP	Pemeriksa	
Peredaran Usaha	B.1	369.471.760	467.696.150	98.224.390
<i>Ditambah :</i>				
- Uang muka pelanggan akhir		-	-	-
- Pendapatan ditangguhkan akhir (PPN dibayar tahun ini)		-	-	-
- Penyerahan antar cabang (dalam hal tidak terdapat pemusatan PPN)		-	-	-
- Harga jual aktiva pasal 16D UU PPN		-	-	-
- Penyerahan tahun sebelumnya difakturkan tahun ini		-	-	-
- Penggantian Biaya yang pajak masukannya telah dikreditkan		-	-	-
- Pemakaian sendiri		-	-	-
- Pemberian cuma-cuma		-	-	-
- Penyerahan BKP/JKP lainnya		-	-	-
Jumlah		-	-	-
<i>Dikurang :</i>				
- Uang muka pelanggan awal (pastikan telah difakturkan masa sebelumnya)		-	-	-
- Pendapatan ditangguhkan awal (pastikan telah difakturkan masa sebelumnya)		-	-	-
- Penyerahan difakturkan tahun sebelumnya		-	-	-
Jumlah		-	-	-
Jumlah Penyerahan Seluruhnya		369.471.760	467.696.150	98.224.390
Jumlah Penyerahan non BKP/JKP		-	-	-
Penyerahan BKP/JKP		369.471.760	467.696.150	98.224.390

Penjelasan		
No.	Uraian	Dasar Hukum
1.	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak (lihat KKP B.1.1)	Pasal 4 ayat (1) UU PPN

Dibuat oleh :			Ditelaah oleh :		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Cakti Buddhi			Bhakti		